

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keterlibatan Iran dalam pengembangan program teknologi nuklir yang dilakukan sebenarnya dimulai pada tahun 1967 kepemimpinan Shah Reza Pahlevi yang menerima bantuan teknis dari AS untuk mengembangkan *peaceful nuclear program* (James Martin Center for Nonproliferation Studies, 2020). Selanjutnya, pada tahun yang sama Iran mendirikan *Teheran Nuclear Research Center* (TNRC). Iran menandatangani Non-proliferation Treaty (NPT) pada tahun 1968, dan Iran secara resmi meratifikasi perjanjian NPT tersebut tahun 1970 (Khan, 2010, p. 47). Kesungguhan Iran dalam pengembangan nuklir ditunjukkan dalam sikap komitmen Iran untuk memiliki teknologi nuklir dengan tujuan damai, hal tersebut dibuktikan pada tahun 1973 dengan mendirikan *Atomic Energy Organization of Iran* (AEOI) (James Martin Center for Nonproliferation Studies, 2020). Pada tahun 1974 Iran dalam pengawasan penuh IAEA, Hal ini mengartikan bahwa semua kegiatan nuklir dilakukan dengan cara yang transparan kepada masyarakat Internasional, dan berada di bawah kontrol penuh dari IAEA (*International Atomic Energy Agency*) (Khan, 2010, p. 47).

Program pengembangan nuklir Iran mengalami hambatan setelah terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979 (Khan, 2010, p. 47). Pada masa awal revolusi yang dipimpin oleh Khomeini ini, kegiatan pembangunan dan pengoperasian reaktor-reaktor nuklir yang dimiliki Iran diberhentikan sementara pengoperasiannya (Alcaff, 2008, p. 94). Kemudian keinginan pengembangan program nuklir Iran pada rezim Khomeini dilanjutkan, namun masa itu pengembangan nuklir Iran bergantung pada bantuan suplai dari negara barat termasuk Amerika Serikat, sehingga pengembangan nuklir menjadi sulit

dilakukan setelah terjadi revolusi Iran dan disusul dengan adanya perang Iran-Irak (CIA, 1988, p. 27).

Pengembangan nuklir Iran selanjutnya mulai dilanjutkan kembali oleh Presiden Rafsanjani. Pada masa Presiden Rafsanjani, Iran berusaha melanjutkan pembangunan reaktor nuklir Bushehr yang sempat terhenti. Dengan bantuan dari perusahaan Jerman *Kraftwerk Union*, Iran meneruskan pembangunan reaktor nuklirnya, akan tetapi akibat tekanan yang dilakukan Amerika Serikat, Jerman meninggalkan proyek pembangunan reaktor tersebut. Sampai tahun 1990 Iran dapat melanjutkan pembangunan fasilitas reaktor nuklir Bushehr kembali dengan melakukan kerjasama bersama Rusia sehingga dapat menyelesaikan satu dari dua reaktor nuklir Bushehr (Jenkins & Dalton, 2014, p. 3). Dilanjutkan pada masa Presiden Khatami program nuklir Iran mengalami perkembangan akan tetapi dengan semakin kuatnya tekanan dari barat maupun Internasional untuk menekan Iran agar tidak menjalankan dan mengembangkan program nuklirnya, maka pemerintah Iran mulai berhati-hati dan mau untuk bekerjasama secara kooperatif dalam mengembangkan program nuklirnya.

Selanjutnya, saat Mahmoud Ahmadinejad terpilih menjadi Presiden pada tahun 2005, Iran mulai tidak berkomitmen dan tidak bersikap kooperatif dengan perjanjian kerjasama dengan IAEA dalam pengawasan pengembangan program nuklir. Pada masa kepemimpinan Presiden Ahmadinejad, pengembangan nuklir dijadikan prioritas utama walaupun mendapatkan tekanan dari negara Barat, Presiden Ahmadinejad berani mengambil resiko dengan tetap menjalankan program nuklir Iran untuk mencapai kemandirian energi bagi kepentingan rakyat Iran. Sejak dipimpin oleh Presiden Ahmadinejad Iran telah berhasil melakukan pengayaan uranium untuk pertama kalinya di Natanz, bahkan Iran mampu memproduksi dan siap menjadi eksportir uranium. Keberhasilan ini menjadi pencapaian terbesar dari program nuklir Iran yang sudah sejak lama dikembangkan (Rajagopalan, Rajeswari Pillai and Biswas, Arka, 2015, pp. 83, 84).

Iran yang kukuh dengan tetap menjalankan program nuklir pada akhirnya mendapatkan sanksi dari Dewan Keamanan PBB pada tahun 2006 sampai 2010. Sanksi tersebut dibuat dalam enam tahapan yang berbeda, yakni: Resolusi 1696 (2006), 1737 (2006), 1747(2007), 1803 (2008), 1835(2008), dan 1929 (2010) (Kerr, 2019, p. 9). Dalam resolusi yang dikenakan secara umum memberlakukan sanksi ekonomi, embargo, dan perdagangan serta larangan atas transaksi komoditas yang berhubungan dengan teknologi nuklir Iran. Dengan dijatuhkannya sanksi melalui resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB meminta kepada pemerintah Iran untuk segera menghentikan program nuklir yang sedang dikembangkan dan segera bersikap kooperatif terhadap IAEA untuk menyelesaikan permasalahan program nuklir Iran.

Babak baru krisis nuklir Iran dimulai setelah Ahmadinejad digantikan oleh Hasan Rouhani, presiden yang berasal dari kalangan reformis. Terpilihnya Rouhani menjadi presiden membawa harapan bagi masyarakat Iran. Rouhani diharapkan mampu untuk mengakhiri sanksi yang dijatuhkan kepada Iran oleh DK-PBB sesuai janji kampanyenya ketika mengikuti pemilu yaitu, merubah kebijakan luar negeri Iran lebih konstruktif dan moderat (Phoenna & Harmiyati, 2016, p. 8). Hassan Rouhani pada tanggal 7 Mei 2013 mencalonkan diri menjadi presiden yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2013. Pada tanggal 15 Juni 2013, Hassan Rouhani pada akhirnya terpilih menjadi presiden ketujuh Iran dengan mengalahkan walikota Teheran Mohammad Bagher Ghalibaf dan keempat kandidat presiden lainnya . Setelah terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden Iran yang baru, Presiden Rouhani menyampaikan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat dan memulihkan perekonomian Iran yang hancur akibat sanksi-sanksi Internasional yang dijatuhkan akibat pengembangan nuklir Iran pada masa kepemimpinan Presiden Ahmadinejad. Dengan melakukan pendekatan secara diplomatis Presiden Rouhani ingin membuka kembali pembicaraan dan perundingan dengan barat untuk menyelesaikan permasalahan nuklirnya dan dengan

dibukanya kembali perundingan dengan barat Presiden Rouhani berharap sanksi-sanksi yang dijatuhkan dapat dicabut dan dengan dicabutnya sanksi internasional berharap akan memperbaiki perekonomian Iran.

Hassan Rouhani adalah seorang ulama Iran lahir di sorkheh Provinsi Semnan pada tanggal 12 November 1948 bertepatan dengan 21 Aban 1327 Hijriyah Syamsiah dan tumbuh dalam keluarga yang taat agama (Mikail, 2013, p. 21). Sebelum menjadi presiden Iran, Hasan Rouhani pernah meniti karir sebagai seorang pengacara akademisi dan diplomat (Rouhani, 2008). Kebijakan luar negeri Iran pada masa kepemimpinan Hassan Rouhani mengalami perubahan. Iran dari sebelumnya kebijakan luar negeri tertutup dan anti terhadap barat, namun ketika dibawah kepemimpinan Hassan Rouhani Iran menjadi lebih terbuka dan dekat dengan negara-negara barat. Dibawah kepemimpinan Presiden Hassan Rouhani, Iran terus berupaya melakukan negosiasi dengan kelompok Proliferasi (P5+1), seperti halnya saat melakukan perundingan di Jenewa yang bertujuan untuk menjaga perdamaian yang mencari solusi sengketa nuklir.

Selain itu setelah negosiasi pertama, Rouhani juga mulai menunjukkan jalur transparansi politik antara Iran dan P5+1. Dalam negosiasi yang dilakukan ditujukan untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran oleh badan hukum internasional. Rouhani melakukan transparansi politik karena memiliki tujuan ingin membangun kepercayaan dari dunia Internasional terkait program nuklir (Rachmadianti, Kusuma, & Prabhawati, 2012, p. 3). Rouhani terus berupaya memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri Iran. Adapun salah satu upaya yang telah dilakukan Hassan Rouhani ialah dengan melakukan negosiasi nuklir antara Iran dan negara P5+1, diantaranya dengan melakukan perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau yang lebih dikenal dengan kesepakatan nuklir Iran.

Sikap Presiden Hassan Rouhani yang bersedia kooperatif melakukan perundingan nuklir dengan Negara P5+1 dan IAEA menjadi topik menarik bagi penulis untuk melakukan

penelitian. Sikap kooperatif Hassan Rouhani yang ditunjukkan berbeda dengan pembuatan keputusan yang dilakukan Presiden sebelumnya Mahmoud Ahmadinejad terkait perundingan program nuklir dari sikap konservatif konfrontatif menjadi sikap kooperatif dengan bersedia berdiplomasi untuk mencapai kesepakatan nuklir (JCPOA).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka muncul permasalahan yang dapat dirumuskan oleh penulis yaitu *mengapa Presiden Iran Hassan Rouhani bersikap kooperatif kepada IAEA dalam program pengembangan nuklir dengan menyepakati Joint Comprehensive Plan Of Action tahun 2015 dimana pada pemerintahan sebelumnya tidak bersikap kooperatif?*

## **C. Kerangka Teori**

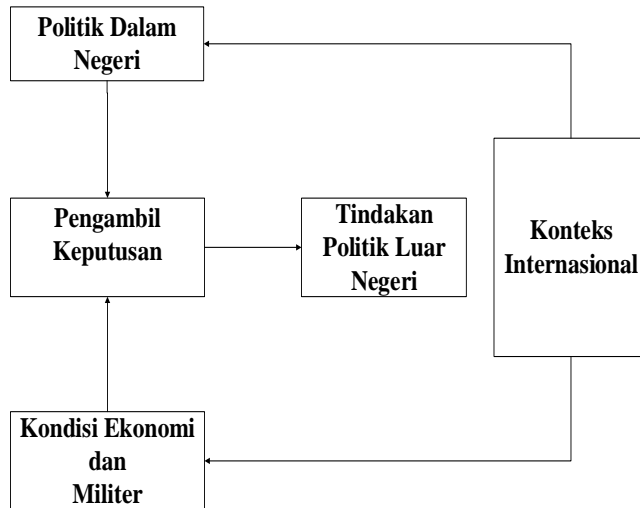
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana atau acuan langsung pelaksanaan suatu pekerjaan (misi) atau tindakan realisasi dari strategi yang merupakan hasil dari penyusunan strategi jangka panjang, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Dalam karya ilmiah ini penulis akan menggunakan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri dari William D. Coplin untuk menganalisa isu yang ada pada karya ilmiah. Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri dari William D. Coplin digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah karena teori ini mampu menjelaskan alasan suatu negara mengambil suatu kebijakan keputusan luar negeri tertentu.

Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin adalah: (Coplin, 1992, p. 28)

*“...Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa*

*pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya, tindakan luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri...”* (Coplin, 1992, p. 28).

**Gambar 1. 1. Proses Pengambilan Keputusan Menurut William D Coplin**



Adapun, menurut William D.Coplin, bahwa untuk menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka fokus utamanya ialah melihat peran pemimpin negara untuk suatu kebijakan luar negeri. Suatu tindakan politik luar negeri negara tersebut dianggap sebagai akibat dari tiga pertimbangan (konsiderasi) yang mempengaruhi para pembuat keputusan (Coplin, 1992, pp. 29, 30):

### **1. Politik Dalam Negeri**

Dampak dari politik domestik atau dalam negeri suatu negara berdampak besar terhadap politik luar negerinya. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Iran seperti demokrasi dan autokrasi yang memiliki

sifat terbuka maupun tertutup merupakan situasi politik dalam negeri Iran yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan kebijakan politik luar atau dalam negeri. Keadaan kondisi politik dalam negeri suatu negara merupakan faktor yang digunakan untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa politik dalam negeri hanya merupakan salah satu konsideran yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan politik luar negeri suatu negara.

Pada teori pengambilan keputusan, Coplin memfokuskan analisisnya terhadap hubungan antar pengambil keputusan politik luar negeri dengan para aktor dalam negeri yang berupaya mempengaruhi perilaku pengambil keputusan politik luar negeri. Istilah aktor yang mempengaruhi kebijakan atau pengambil keputusan disebut sebagai *policy influencer* yang merupakan sumber dukungan bagi penguatan rezim suatu negara (Jackson & Sorensen, 2013). Pengambil keputusan mengatur strategi, menentukan kepentingan nasional dan membuat kebijakan serta mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukan.

Kemudian Coplin membagi aktor yang mempengaruhi pengambil keputusan (*policy influencers*) menjadi empat katagori yaitu, *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer* (Coplin, 1992, pp. 29, 30). Pertama *Bureaucratic influencer* adalah berbagai individu ataupun kelompok birokrat yang berada didalam sistem lembaga eksekutif pemerintah yang membantu aktor pengambil keputusan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. *Bureaucratic influencer* atau kelompok-kelompok birokratis tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap aktor pengambil keputusan dalam pemerintahan apabila mereka termasuk bagian dari anggota pengambil keputusan (Coplin & Marbun, 2003, pp. 82, 83).

Kedua *Partisipan Influencer* disebut juga partai yang mempengaruhi, merupakan kelompok yang bertujuan menerjemahkan atau menyampaikan tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang menjadi tuntutan politis, dimana tuntutan tersebut ditujukan kepada aktor pengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah (Coplin & Marbun, 2003, p. 84). Ketiga adalah *Interest Influencer* atau kepentingan yang mempengaruhi, merupakan kelompok –kelompok orang yang tergabung ke dalam serangkaian kesamaan kepentingan, pengaruh kelompok ini tidak cukup luas untuk menjadi dasar bagi aktivitas kelompok partai, akan tetapi dibutuhkan dalam menyerahkan sumber-sumber untuk mendapat dukungan dari aktor pengambil keputusan (Coplin & Marbun, 2003, p. 87). Keempat adalah *Mass Influencers* adalah opini publik atau massa yang mempengaruhi, dimana ini mengacu kepada opini publik yang perlu dipertimbangkan oleh aktor pengambil keputusan ketika akan menyusun kebijakan politik luar negeri. *Mass influencers* berdampak pada para aktor pengambil keputusan tergantung pada sistem politik yang dianut oleh suatu negara (Coplin & Marbun, 2003, p. 88).

Pada kasus penelitian ini, sikap kooperatif Hassan Rouhani kepada IAEA dalam pengembangan program nuklir Iran dipengaruhi oleh kelompok birokratis (*bureaucratic influencer*). Dalam pemerintahan Iran konstelasi politik terbagi ke dalam dua kubu, kubu pertama merupakan kelompok politik kubu moderat atau reformis dan kubu kedua adalah kelompok politik kubu konservatif garis keras (*hardliners*) (Eisenstad & Khalaji, 2011). Perbedaan dari kedua kubu tersebut dapat dilihat pada beberapa aspek, yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan aspek politik. Pada kelompok kubu moderat reformis mengapresiasi dan menjunjung kebebasan



sipil, keterbukaan sedangkan kubu konservatif garis keras menentang pengaruh arus informasi dari luar khususnya negara-negara barat (Holmquist, 2016). Pada penelitian ini akan dibahas bidang politik dimana kubu moderat reformis mendukung adanya hubungan politik luar negeri dengan barat, sedangkan kubu konservatif garis keras menentang adanya pengaruh negara-negara barat khususnya terhadap Amerika Serikat (Alhadar, 2017).

Penelitian ini akan lebih membahas pada kubu moderat reformis Iran yang mengharapkan dan mendukung adanya hubungan politik dengan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan akibat dari pemerintahan sebelumnya yakni pada pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad yang tergabung dalam kubu konservatif garis keras yang melakukan kebijakan politik bersifat konfrontatif yang membuat negara-negara barat merasa terancam sehingga merespon dengan menjatuhkan sanksi kepada Iran yang membuat kondisi politik dalam negeri Iran memburuk. Dengan terpilihnya Hassan Rouhani sebagai Presiden Iran membuat kubu moderat reformis pada pemerintahan Iran menjadi lebih kuat pengaruhnya. Sehingga pada masa pemerintahan Rouhani, Iran menginginkan perbaikan hubungan politik dengan negara-negara barat untuk meringankan sanksi yang dijatuhkan pada masa pemerintahan Iran sebelumnya.

## **2. Situasi Ekonomi dan Militer**

Kondisi ekonomi dan militer memiliki peran yang penting dalam proses penyusunan kebijakan politik luar negeri. Peran ekonomi dan militer berpengaruh dalam proses penyusunan politik luar negeri dengan memberikan tuntutan serta dukungan kepada aktor pengambil keputusan politik luar negeri (Coplin & Marbun, 2003, p. 172). Kondisi ekonomi dan

militer harus dipertimbangkan oleh aktor pengambil keputusan dalam menyusun kebijakan politik luar negeri, serta menjadikan kondisi ekonomi dan militer negara sebagai salah satu faktor untuk merumuskan dalam pengambilan keputusan kebijakan politik luar negeri. Aktor pengambil keputusan harus mempertimbangkan komitmen mereka dalam mengambil keputusan serta memahami keterbatasan kemampuan ekonomi dan militer negaranya (Coplin & Marbun, 2003, p. 172).

Keadaan ekonomi dan militer dapat diartikan sebagai salah satu sumber kekuatan dari suatu negara. Kekayaan dan kemakmuran suatu negara dipengaruhi oleh jumlah produksi barang dan jasa serta jumlah permintaan akan barang komoditas ekonomi yang berpengaruh terhadap pola dan prospek pertumbuhan ekonomi (Coplin & Marbun, 2003, p. 115). Dalam menentukan suatu negara bisa dikatakan kuat dapat dilihat dari GNP (*gross national product*) yang di gunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi negara dalam satu tahun. Hal ini dikarenakan angka-angka dari GNP bisa dikonversikan menjadi satu standar mata uang yang digunakan untuk membandingkan kekayaan suatu negara dengan negara lain, walaupun adanya perbedaan nilai tukar mata uang negara-negara ini, kondisi nilai tukar mata uang suatu negara yang bermasalah juga berpengaruh pada kondisi ekonomi dan militer suatu negara yang berdampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (Coplin & Marbun, 2003, p. 115).

Pada kasus penelitian ini, dampak yang ditimbulkan dari penjatuhan sanksi ekonomi kepada Iran oleh negara-negara barat sangat berdampak pada kondisi perekonomian Iran. Sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat untuk tidak menjalin hubungan ekonomi dan menjauhi kegiatan perekonomian dari Iran menyebabkan kondisi ekonomi

Iran menjadi tidak stabil (Macaluso, 2014, p. 11). Setelah penjatuhan sanksi tersebut PBB, Amerika Serikat dan Uni Eropa melakukan embargo ekonomi terhadap Iran yang menyebabkan nilai tukar mata uang Rial Iran menjadi jatuh dan tidak memiliki nilai lebih dibandingkan dengan nilai mata uang USD (BBC INDONESIA, 2012).

Embargo ekonomi yang dijatuhkan oleh dunia Internasional pada masa pemerintahan Ahmadinejad sangat berdampak pada perekonomian Iran. Salah satu embargo yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan PBB kepada Iran adalah embargo yang menargetkan kepada perdagangan yang bersumber dari sektor energi seperti pelarangan perdagangan jual beli minyak mentah serta gas bumi yang merupakan sumber pendapatan dan komoditas ekspor utama yang dimiliki Iran. Akibat dari sanksi dan embargo tersebut nilai tukar mata uang Iran pada tahun 2012 nilai 1 USD dihargai sebesar 20.000 Rial Iran.

Beberapa bulan setelah penjatuhan sanksi dan embargo oleh negara-negara barat pada tahun 2013 nilai tukar mata uang Rial Iran menjadi 36.000 Rial terhadap 1 USD (Nikaeen, 2012). Hal ini sangat merugikan Iran dengan dijatuhkannya sanksi dan embargo karena jumlah serta potensi pendapatan yang bisa didapatkan oleh Iran jika tidak disanksi oleh dunia Internasional jumlahnya sangat besar sehingga kestabilan keuangan Iran terganggu karena sanksi tersebut.

Tentunya dalam penjatuhan sanksi ekonomi dan embargo terhadap Iran ini merupakan respon dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB atas ketidak kooperatifnya pemerintahan sebelumnya yakni masa Ahmadinejad dalam program pengembangan nuklirnya. Hal ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Hassan Rouhani untuk memperbaiki

perekonomian dan inflasi yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya.

### **3. Konteks Internasional**

Konteks Internasional merupakan faktor penting bagi aktor pengambil keputusan untuk mengeluarkan keputusan kebijakan luar negeri. Hal ini menjadi penting apabila keputusan tersebut menyangkut hubungan politik dengan negara lain. Coplin menyatakan bahwa faktor konteks Internasional dapat mempengaruhi para pembuat keputusan kebijakan suatu negara, baik didalam negeri maupun luar negeri.

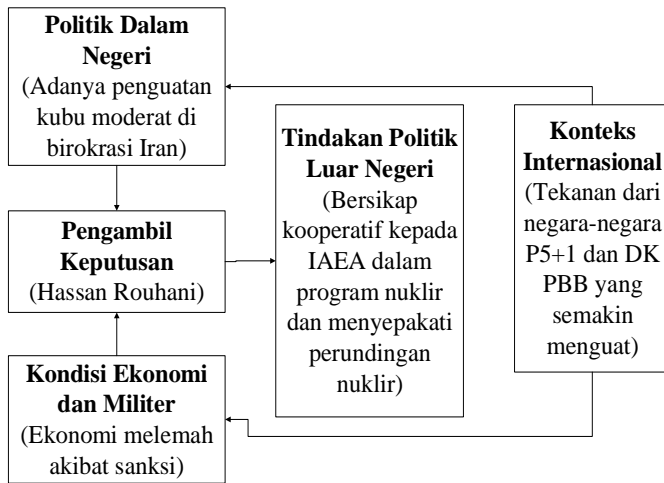
Dalam bukunya William D. Coplin terdapat ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis (Coplin & Marbun, 2003, p. 167). Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara-negara itu dengan negara-negara lain.

Pada penelitian kasus penelitian ini Amerika Serikat dan negara-negara EU melakukan embargo kepada Iran dengan maksud menekan Iran agar menyerah dan menanggihkan program pengembangan nuklirnya dan pemberlakuan embargo tersebut tentunya bertujuan menekan Iran agar bersedia berunding dan menyepakati perjanjian terkait program nuklirnya demi keamanan bersama.

Dengan tekanan yang dilakukan oleh AS maupun EU membuat Hassan Rouhani sebagai aktor pengambil keputusan bersedia bersikap kooperatif terkait pengembangan program nuklir dan bersedia melakukan diplomasi dan negosiasi dengan negara-negara barat. Seperti yang telah dijabarkan diatas pada konteks Internasional Iran mengalami berbagai tekanan

sehingga merubah kebijakan luar negerinya yang pada pemerintahan sebelumnya bersikap keras dan konfrontatif berubah menjadi terbuka dan kooperatif dalam menentukan kebijakan politiknya di masa pemerintahan Hassan Rouhani.

**Gambar 1. 2. Interaksi antar Faktor dalam Proses Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri**



**D. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran diatas yang kemudian dianalisis dengan memanfaatkan teori pembuatan keputusan kebijakan politik luar negeri William D. Coplin, maka penulis berasumsi mengapa pemerintahan Iran bersikap kooperatif terhadap IAEA dalam pengembangan program nuklir dipengaruhi oleh:

1. Terjadi adanya perubahan kondisi politik domestik Iran, ditandai dengan menguatnya kubu moderat-reformis dalam birokrasi pemerintahan Iran.

2. Kondisi ekonomi Iran yang semakin melemah, dikarenakan sanksi ekonomi dan embargo yang diterapkan oleh negara-negara Barat.
3. Pada konteks Internasional terjadi adanya tekanan dari IAEA dan negara-negara P5+1 yang semakin menguat.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan tentang sejarah hubungan Iran dengan negara barat dan Amerika Serikat sebelum dan setelah revolusi islam Iran.
2. Memaparkan mengenai program nuklir Iran dan kebijakan luar negeri terkait program nuklir.
3. Menjelaskan mengenai perundingan Iran dengan IAEA dan negara P5+1 terkait program nuklir.
4. Untuk mengetahui sikap kooperatif kebijakan luar negeri Iran pada masa presiden Hassan Rouhani terkait program nuklir dan upaya untuk memperbaiki hubungan perekonomian dan politik Iran dengan negara-negara barat.

#### **F. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer yaitu buku-buku dan sumber data sekunder yaitu jurnal dan artikel di internet yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur akan dikumpulkan dan diklarifikasi kemudian permasalahan dijelaskan dan di analisa berdasarkan fakta-fakta yang ada. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah sikap kooperatif Presiden Hassan Rouhani dalam kebijakan luar negeri terkait program nuklir dalam upaya pencabutan sanksi pada masa Presiden Hassan Rouhani tahun 2013-2015. Semua data yang berhubungan dengan penelitian

ini dikumpulkan kemudian diteliti dengan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan penelitian tidak melebar. Penelitian ini dimulai dari tahun 2003 dimana program nuklir Iran dilihat oleh dunia Internasional sebagai sesuatu yang dapat membahayakan dan mengancam, sehingga IAEA membuat laporan tentang Iran setelah inspeksi ke fasilitas Natanz dan menemukan adanya potensi yang dapat membahayakan dunia, sampai pada tahun 2015 sebagai batasan penelitian dimana telah terjadi kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara barat. Selain batasan tahun tersebut, tidak tertutup kemungkinan peneliti juga membahas literatur sejarah hubungan Iran dengan negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat dalam dinamika hubungan negara-negara tersebut untuk bisa mendukung data penelitian ini.

### **H. Sistematika Penulisan**

Bab 1 akan membahas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2 membahas pengembangan program nuklir Iran yang berisi ide pengembangan nuklir, pendirian reaktor nuklir dan perkembangan kapasitas sentrifugal. Bab 3 membahas dinamika tekanan Internasional dan sikap Iran yang berisi rezim regulasi Internasional tentang nuklir (IAEA), tekanan IAEA terhadap pengembangan nuklir Iran, sikap konfrontasi Iran dan perubahan dari konfrontatif ke kooperatif. Bab 4 menjelaskan alasan sikap kooperatif Iran kepemimpinan Hassan Rouhani dalam program nuklir dipengaruhi oleh 3 faktor antara lain politik dalam negeri, situasi ekonomi dan militer serta konteks internasional. Bab 5 merupakan kesimpulan dari penelitian ini dan saran.